

Judul : TKD Batal dipangkas, selaras dengan aspirasi Pemda
Tanggal : Senin, 15 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

TKD Batal Dipangkas

Selaras Dengan Aspirasi Pemda

SENAYAN menyambut baik rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menilai, keputusan Menkeu selaras dengan aspirasi Pemerintah Daerah (Pemda) serta kebutuhan masyarakat di daerah. Sebab, daerah adalah ujung tombak pelayanan publik.

"Dengan TKD yang utuh, bahkan meningkat, maka pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan dasar dapat berjalan lebih baik," kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp 650 triliun dari sebelumnya di APBN 2025 tercatat sebesar Rp 864 triliun.

Purbaya pun berencana melonggarkan dana TKD dalam

RAPBN 2026 yang sebelumnya dipangkas mencapai 24,8 persen.

"(TKD) dilonggarkan dan ditingkatkan," ujar Purbaya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menurut Purbaya, hal ini dilakukan untuk meredam keresahan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang sempat memutuskan menaikkan tarif pajak daerah. Seperti, kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat kondisi fiskal yang cekak.

Dia membeberkan adanya dinamika besar dalam alokasi TKD di beberapa tahun terakhir. Pada 2024, pagu TKD tercatat sekitar Rp 857,6 triliun, meningkat menjadi Rp 919,9 triliun pada 2025.

Namun, dalam rancangan awal RAPBN 2026 sempat diusulkan hanya Rp 650 triliun, atau turun hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Penurunan tajam itu jelas



Muhammad Kholid

berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah," kritik Kholid.

Karena itu, kata Kholid, rencana Purbaya membatalkan pemangkasan TKD adalah langkah tepat demi menjaga kesinambungan pelayanan publik di daerah.

Kholid mengingatkan, transfer ke daerah tidak boleh dipandang

sebagai beban APBN, melainkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan basis ekonomi nasional.

"Bila daerah tumbuh, Indonesia akan tumbuh bersama," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS ini.

Selain itu, Kholid menekankan perlunya desain transfer yang lebih adil dan berbasis kebutuhan. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, ketimpangan infrastruktur, serta kebutuhan khusus di sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam alokasi TKD.

"Kami mendorong agar TKD 2026 tidak hanya utuh, tidak dipangkas tetapi juga tepat sasaran dan berkeadilan," tandas Kholid.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said menambahkan, belum ada keputusan resmi dari Menkeu untuk membatalkan pemangkasan TKD dalam APBN 2026. Keputusan resminya baru akan ditetapkan di Komisi XI DPR pada Senin

(15/9/2025).

"Belum ada (keputusan pembatalan TKD). Malah mungkin ada penambahan dana ke daerah," kata Muhidin dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Muhidin meluruskan, sejak awal tidak ada istilah namanya pemangkasan TKD. Sebab, masih ada dana mengalir dari pusat ke daerah, namun bukan dalam bentuk obyek pendapatan daerah, tapi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

"Jadi masih ada pembangunan infrastruktur jalan, bendungan dan jembatan yang dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat," kata politikus Golkar ini.

Terkait banyaknya kepala daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) karena TKD berkurang, Muhidin tidak mengetahui secara pasti. Namun, selama ini memang PBB sudah lama tidak naik dan itu kebijakan masing-masing daerah. ■ TIF